



Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis dalam Mewujudkan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Barito Utara

Muhammad Rafiqhi Alfaqih^{1*}, Sitna Hajar Malawat², Rizky Subhan³

¹⁻³ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Islam Kalimantan MAAB (Uniska) Banjarmasin, Indonesia

*Penulis Korespondensi: muhammadrafiqhi20@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the MBG policy in fulfilling nutritional needs in North Barito Regency and to identify the obstacles encountered. A qualitative descriptive approach was employed, with MAN Barito Utara and SMAN 4 Muara Teweh as research sites. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed using Edward III's policy implementation model encompassing four indicators: communication, resources, implementor disposition, and bureaucratic structure. The findings reveal that MBG implementation at both schools has generally been running well but not yet optimally. Communication was structured and food production quality was ensured through certified kitchens. All implementors demonstrated high commitment and enthusiasm, serving as the primary strength of the program. Key obstacles were identified in the resource dimension absence of dedicated nutrition personnel, inadequate distribution space, and minimal nutrition education for students and in the bureaucratic structure dimension, including SOPs not tailored to each school's specific characteristics, informal task divisions lacking official decrees, and the absence of systematic staff substitution mechanisms. The study recommends dedicated budget allocation for distribution facilities, issuance of official task division decrees, SOP refinement, and development of nutrition education modules integrated into teaching and learning activities.*

Keywords: *Edward III; Free Nutritious Meal Program; Nutritional Fulfillment; Policy Implementation; Public Administration.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program MBG dalam mewujudkan pemenuhan gizi di Kabupaten Barito Utara serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di MAN Barito Utara dan SMAN 4 Muara Teweh. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang mencakup empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program MBG di kedua sekolah secara umum telah berjalan baik namun belum optimal. Komunikasi berlangsung terstruktur dan kualitas produksi makanan terjamin melalui dapur bersertifikasi. Seluruh pelaksana menunjukkan komitmen dan antusiasme yang tinggi sehingga menjadi kekuatan utama keberhasilan program. Kendala utama ditemukan pada dimensi sumber daya, yakni ketiadaan tenaga khusus gizi, kapasitas ruang distribusi yang tidak memadai, serta minimnya edukasi gizi kepada peserta didik; dan pada dimensi struktur birokrasi, berupa SOP yang belum disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sekolah, pembagian tugas yang masih informal, serta belum tersedianya mekanisme penggantian petugas yang sistematis. Penelitian ini merekomendasikan alokasi anggaran khusus untuk fasilitas distribusi, penerbitan Surat Keputusan resmi pembagian tugas, penyempurnaan SOP, serta pengembangan modul edukasi gizi yang terintegrasi dalam kegiatan belajar mengajar.

Kata Kunci: Administrasi Publik; Edward III; Implementasi Kebijakan; Makan Bergizi Gratis; Pemenuhan Gizi.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Salah satu faktor penting yang secara langsung memengaruhi kualitas SDM adalah pemenuhan gizi, khususnya pada kelompok usia sekolah. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam paparan virtualnya mengungkapkan bahwa sekitar 60% anak Indonesia tidak memiliki akses terhadap makanan

bergizi seimbang, dan sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada terhambatnya perkembangan fisik dan kognitif individu, tetapi juga berpotensi menurunkan daya saing sumber daya manusia Indonesia secara nasional (Putri et al., 2026; Wibowo et al., 2026).

Merespons persoalan tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan strategis nasional. Program ini secara resmi dimulai pada 6 Januari 2025, menyoar 190 titik layanan di 26 provinsi pada tahap awal, dengan target penerima manfaat sebesar 3 juta orang pada kuartal pertama dan 15 juta pada akhir 2025. Adapun pada tahun 2026, anggaran program ini meningkat signifikan menjadi Rp. 335 Triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Kebijakan ini berlandaskan hukum melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional sebagai penyelenggara utama Program MBG.

Namun demikian, keberhasilan suatu kebijakan publik tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas desain regulasinya, melainkan sangat bergantung pada proses implementasinya di lapangan. Edward III (1980) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap paling krusial yang menentukan apakah kebijakan dapat benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok sasaran. Ia menyatakan bahwa ada empat indikator yang saling berkaitan dalam mengukur keberhasilan implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Menurut Subianto (2020), kegagalan pada salah satu indikator berpotensi menghambat efektivitas kebijakan secara keseluruhan.

Di Kabupaten Barito Utara, Program MBG resmi diluncurkan pada 15 Oktober 2025 dengan SPPG Polres Barito Utara sebagai operator yang melayani 9 satuan pendidikan dan 2.684 penerima manfaat. Namun berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada Maret 2026, ditemukan sejumlah permasalahan pada tahap implementasi. Pada aspek komunikasi, penyampaian tujuan, manfaat, dan tata kelola program kepada peserta didik dinilai belum jelas dan terstruktur. Pada aspek sumber daya, keterbatasan jumlah dapur SPPG menyebabkan ketidaksesuaian jadwal distribusi. Pada aspek sikap pelaksana, sejumlah staf di sekolah merasa kurang kompeten dalam menjalankan program. Sementara pada aspek struktur birokrasi, keterlibatan berbagai lembaga secara bersamaan termasuk BGN, Pemerintah Kabupaten, Polres, yayasan swasta, dan Dinas Pendidikan belum disertai penetapan satu otoritas koordinatif yang jelas di tingkat daerah, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Berbagai penelitian terdahulu turut mengonfirmasi permasalahan serupa. Pujiyanto & Solihat, (2026) menemukan bahwa aspek komunikasi program MBG di SMKN 1 Jogonalan belum optimal, termasuk minimnya penyampaian pesan resmi kepada peserta didik dan orang tua. Pora et al., (2025) mengidentifikasi kendala infrastruktur dan distribusi sebagai penghambat kelancaran implementasi secara nasional. Suryanto et al., (2026) menunjukkan rendahnya kesiapan dan kompetensi para implementer di tingkat sekolah, terutama dalam manajemen distribusi dan standar higienitas. Adapun Herdiana, (2025) menegaskan bahwa belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penghambat yang mengakibatkan berbagai insiden di lapangan, seperti keracunan makanan dan keterlambatan distribusi.

Berdasarkan kesenjangan antara kebijakan dan realita lapangan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam proses dan kendala implementasi Program MBG di Kabupaten Barito Utara, khususnya di MAN Barito Utara dan SMAN 4 Muara Teweh. Dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III, penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan utama: bagaimana implementasi Kebijakan Program MBG dalam mewujudkan pemenuhan gizi di Kabupaten Barito Utara, dan apa saja kendala yang dihadapi dalam proses implementasi tersebut (Rifna et al., 2026). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi kajian administrasi publik sekaligus menyumbangkan rekomendasi praktis bagi perbaikan tata kelola program di tingkat daerah dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 (Sakila et al., 2026; Lambe et al., 2026).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan atau pembanding dalam pelaksanaan penelitian ini:

Septiana Louisa Silaban et al., (2026) “Analisis Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Jambi Menurut Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan program Makan Bergizi Gratis di Kota Jambi dengan fokus pada dinamika dalam implementasi program serta faktor-faktor penghambat dengan perspektif implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pelaksana kebijakan, serta dokumentasi dengan para informan yang telah ditentukan berdasarkan purposive sampling.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program MBG di Kota Jambi belum berjalan secara optimal. Kondisi ini ditandai karena kuatnya dominasi pemerintah pusat dalam proses pengambilan keputusan, lemahnya koordinasi antaraktor di tingkat daerah, serta belum memadainya kesiapan kelembagaan pendukung, terutama pada aspek sumber daya manusia, sistem pengawasan, dan kejelasan standar operasional pelaksanaan.

Yohanes et al., (2026) “Analisis Implementasi dan Kendala dalam Program MBG pada Pendidikan SD, SMP dan SMA Negeri Di Kota Jayapura”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan kendala pelaksanaan program MBG pada jenjang SD, SMP, dan SMA Negeri di Kota Jayapura. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan populasi seluruh sekolah negeri di lima distrik Kota Jayapura, yaitu Abepura, Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Heram, dan Muara Tami. Sampel penelitian berjumlah 158 responden yang terdiri dari dua guru per sekolah, dipilih dengan teknik quota sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan dianalisis secara univariat menggunakan IBM SPSS Statistics versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program MBG di Kota Jayapura berjalan dengan baik pada aspek perencanaan dan koordinasi antarinstansi, namun masih terdapat kendala dalam aspek distribusi pangan, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta pengawasan mutu gizi di sekolah-sekolah tertentu. Faktor geografis dan logistik di wilayah timur Indonesia turut menjadi hambatan utama dalam efektivitas pelaksanaan program. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan tata kelola lintas sektor, peningkatan kapasitas pelaksana lokal, serta adaptasi kebijakan berbasis konteks wilayah guna menjamin keberlanjutan dan pemerataan manfaat program MBG di masa mendatang.

Nasir Rahmad et al., (2026) “Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah: Analisis Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Koordinasi Aktor”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pelaksanaan MBG di UPTD SMP Negeri 1 Kalabahi, Kabupaten Alor, sebagai bagian dari evaluasi implementasi kebijakan pada level sekolah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terhadap kepala sekolah serta petugas pengelola MBG internal sekolah. Data observasi dianalisis menggunakan persentase dan dikategorikan berdasarkan pedoman interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan MBG berada pada kategori baik dengan nilai umum sebesar 74,26%. Secara rinci, penerimaan makanan memperoleh nilai 88,86% (baik), distribusi makanan 66,6% (cukup baik), uji

organoleptik 66,6% (cukup baik), dan pelaksanaan makan 72,45% (baik). Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan MBG di tingkat sekolah sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan, kerja sama tim, serta kepatuhan terhadap prosedur sebagai bentuk akuntabilitas layanan publik. Meski demikian, masih terdapat kelemahan pada aspek administrasi pengawasan, ketertiban distribusi, dan pendampingan pelaksanaan makan yang berpotensi menurunkan efektivitas implementasi serta kepercayaan publik terhadap program.

3. METODE PENELITIAN

Pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena atau subjek tertentu hanya dapat diperoleh melalui proses penelitian yang terstruktur dan terencana. Dalam hal ini, penerapan metode penelitian yang tepat menjadi faktor penting dalam mengungkap sebuah fenomena secara sistematis. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono, (2022) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif menurut Sugiyono, (2022) adalah data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data diperoleh, kemudian dilakukan analisis data. Menurut Sugiyono, (2022) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan model dari Miles dan Huberman yang terdiri dari empat tahapan analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis dalam Mewujudkan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Barito Utara

Komunikasi

Komunikasi merupakan elemen fundamental dalam implementasi kebijakan publik. Edwards III (1980) menekankan bahwa kebijakan hanya dapat diimplementasikan secara optimal apabila informasi yang disampaikan bersifat jelas, konsisten, dan akurat kepada seluruh pelaksana. Dalam program MBG di Kabupaten Barito Utara, komunikasi dianalisis melalui tiga dimensi: transmisi, kejelasan pesan, dan ketetapan pesan.

Dari dimensi transmisi, penyampaian informasi berlangsung secara terstruktur dan berjenjang. Pihak SPPG Polres Barito Utara menyampaikan kebijakan melalui surat resmi yang ditandatangani koordinator wilayah, dilanjutkan sosialisasi langsung di setiap sekolah mitra. Kepala Sekolah MAN Barito Utara menyatakan bahwa informasi diterima melalui koordinasi langsung dengan Kementerian Agama Kabupaten dan surat resmi dari SPPG, kemudian diteruskan kepada dewan guru dan wali murid. Di SMAN 4 Muara Teweh, informasi diterima melalui surat edaran Dinas Pendidikan yang ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi bersama SPPG dan pembentukan tim internal sekolah. Mekanisme transmisi berlapis ini sejalan dengan pandangan Edwards III bahwa penyampaian informasi harus menjangkau seluruh pelaksana di setiap tingkatan.

Dari dimensi kejelasan pesan, secara umum para pelaksana di tingkat sekolah menilai petunjuk teknis cukup mudah dipahami. SPPG menggunakan bahasa sederhana, menyediakan buku panduan teknis bergambar diagram alur distribusi, standar gizi per porsi, dan tata cara pengaduan, serta membuka kanal komunikasi dua arah melalui grup WhatsApp khusus. Namun, masih terdapat kebutuhan klarifikasi pada aspek teknis mendalam: Kepala Sekolah MAN Barito Utara mengidentifikasi perlunya penjelasan lebih lanjut terkait pengelolaan sisa makanan, sedangkan SMAN 4 Muara Teweh meminta panduan tentang mekanisme substitusi menu ketika bahan baku lokal tidak tersedia. Di tingkat siswa, kejelasan informasi belum menyentuh aspek edukatif mengenai kandungan gizi dari menu yang dikonsumsi setiap harinya.

Dari dimensi ketetapan pesan, konsistensi informasi antarwaktu terjaga dengan baik. SPPG menerapkan mekanisme evaluasi rutin setiap dua minggu untuk menyamakan persepsi sebelum instruksi baru diimplementasikan. Tidak ditemukan kontradiksi antara informasi sosialisasi awal dengan pelaksanaan di lapangan, dan setiap pembaruan regulasi dikomunikasikan secara tertulis kepada seluruh sekolah mitra secara serentak.

Secara keseluruhan, dimensi komunikasi berjalan baik. Keunggulan utama terletak pada mekanisme transmisi berjenjang, dukungan media komunikasi yang beragam, dan konsistensi pesan yang kuat. Namun masih terdapat ruang perbaikan pada kedalaman pesan di tingkat penerima manfaat akhir, terutama edukasi gizi kepada peserta didik sebagai kelompok sasaran utama.

Sumber Daya

Edwards III (1980) menegaskan bahwa meskipun instruksi telah dikomunikasikan dengan jelas, implementasi kebijakan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Aspek sumber daya dianalisis melalui tiga dimensi: kecukupan staf, fasilitas, dan kewenangan.

Dari aspek kecukupan staf, baik MAN Barito Utara maupun SMAN 4 Muara Teweh mengakui bahwa tenaga khusus yang menangani program MBG secara penuh waktu masih belum ideal. Kedua sekolah mengandalkan guru piket, koordinator UKS, dan tenaga administrasi yang merangkap tugas distribusi makanan di luar tanggung jawab utama mereka. Kepala Sekolah MAN Barito Utara menyatakan: "Saat ini tugas pengelolaan MBG kami bebankan kepada koordinator UKS dan wali kelas secara bergantian... pengetahuan mendalam tentang standar gizi dan keamanan pangan masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan yang terstruktur." Kondisi ini mencerminkan adanya celah antara ketersediaan SDM yang ideal dengan realitas lapangan. Pihak SPPG telah menyiapkan modul pelatihan singkat bagi koordinator sekolah untuk meningkatkan kompetensi teknis penanganan pangan.

Dari aspek fasilitas, MAN Barito Utara memanfaatkan aula madrasah sebagai ruang distribusi, sedangkan SMAN 4 Muara Teweh menggunakan kantin. Kedua fasilitas dinilai cukup layak secara dasar, namun menghadapi kendala kapasitas yang memaksa distribusi dilakukan secara bergilir per kelas. Keterbatasan tempat duduk dan keharusan siswa menyediakan peralatan makan secara mandiri menjadi permasalahan teknis yang masih perlu ditangani. Di sisi hulu, SPPG telah memastikan standar fasilitas produksi yang tinggi melalui dapur bersertifikasi, wadah food-grade, dan armada pengiriman berpendingin.

Dari aspek kewenangan, pembagian otoritas antara SPPG dan pihak sekolah telah ditetapkan secara eksplisit melalui perjanjian kerja sama. SPPG memegang kewenangan penuh atas produksi, penentuan menu, dan standar gizi sesuai regulasi BGN, sementara sekolah memiliki otoritas penuh dalam mengatur teknis operasional distribusi. Pembagian kewenangan yang jelas ini dinilai efektif dalam mencegah tumpang tindih peran, sebagaimana yang ditegaskan Edwards III.

Secara keseluruhan, aspek sumber daya menunjukkan gambaran positif pada dimensi kewenangan dan kualitas produksi, namun memerlukan perhatian serius pada kecukupan staf berkeahlian dan kapasitas fasilitas distribusi di tingkat sekolah.

Disposisi/Sikap Pelaksana

Edwards III (1980) berpendapat bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila para pelaksana memiliki disposisi atau kecenderungan sikap yang positif dan mendukung tujuan kebijakan. Aspek ini dianalisis melalui empat dimensi: komitmen, kejujuran/integritas, keahlian dan motivasi, serta respons terhadap kebijakan.

Dari aspek komitmen, para Kepala Sekolah di kedua satuan pendidikan menunjukkan komitmen yang tinggi, bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sebagai tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan peserta didik. Komitmen ini diwujudkan melalui pengintegrasian jadwal program MBG ke dalam tata tertib sekolah, pembentukan tim internal, dan keterlibatan aktif dalam setiap rapat koordinasi. Di sisi SPPG, komitmen termanifestasi melalui konsistensi penyiapan dan pengiriman makanan tanpa hari yang terlewat serta investasi pada peralatan produksi berstandar gizi.

Dari aspek kejujuran dan integritas, ditemukan budaya transparansi yang kuat di semua lini pelaksana. Kepala sekolah secara terbuka melaporkan setiap kendala tanpa menyembunyikannya dari pemangku kebijakan. SPPG mengafirmasi komitmen serupa dengan menyatakan tidak pernah memanipulasi angka distribusi dan terbuka terhadap audit serta inspeksi mendadak. Transparansi para guru ketika menghadapi perubahan mendadak, seperti pergantian menu, diapresiasi siswa sebagai sikap yang meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan program.

Dari aspek keahlian dan motivasi, tim SPPG memiliki tenaga-tenaga profesional berlatar belakang gizi, teknologi pangan, dan manajemen distribusi dengan motivasi yang bersumber dari kesadaran akan dampak program terhadap tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Sementara pelaksana di tingkat sekolah, meskipun tidak memiliki latar belakang gizi, menunjukkan motivasi kuat yang bersumber dari kepedulian terhadap peserta didik dan keyakinan bahwa gizi yang baik adalah hak setiap anak.

Dari aspek respons terhadap kebijakan, seluruh aktor menunjukkan respons yang positif dan antusias. Para siswa di kedua sekolah menyatakan program ini sangat membantu, khususnya bagi yang tidak sempat sarapan dari rumah. Secara keseluruhan, variabel disposisi merupakan kekuatan terbesar dalam implementasi program MBG di Kabupaten Barito Utara. Integritas, motivasi, dan komitmen yang tinggi dari seluruh pemangku kepentingan telah

menjadi pondasi kepercayaan yang solid, membuktikan pandangan Edwards III bahwa sikap positif pelaksana mampu mengkompensasi kekurangan pada variabel lain.

Struktur Birokrasi

Edwards III (1980) menjelaskan bahwa meskipun sumber daya tersedia dan pelaksana memiliki sikap positif, tanpa struktur birokrasi yang jelas dan efisien, implementasi kebijakan tetap rentan mengalami kegagalan. Struktur birokrasi dianalisis melalui dua dimensi: Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi (pembagian kerja).

Dari aspek SOP, SPPG Polres Barito Utara telah menyusun dan mendistribusikan dokumen SOP yang komprehensif kepada setiap sekolah mitra. SOP mencakup standar pengiriman, prosedur serah terima makanan, penanganan makanan berlebih, hingga mekanisme pelaporan harian, yang disusun mengacu pada regulasi BGN dan diperbarui setiap semester berdasarkan evaluasi lapangan. Kedua sekolah menilai SOP yang diterima sudah cukup komprehensif untuk operasional harian.

Namun, Kepala Sekolah MAN Barito Utara mengidentifikasi bahwa beberapa poin teknis dalam SOP masih perlu disesuaikan dengan karakteristik madrasah yang memiliki jadwal kegiatan berbeda dari sekolah umum. Kepala Sekolah SMAN 4 Muara Teweh menekankan pentingnya pembaruan SOP secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi riil di lapangan. Di tingkat siswa, prosedur dipahami dan diikuti dengan baik meskipun petunjuk yang diterima bersifat lisan, bukan tertulis.

Dari aspek fragmentasi, struktur pelaksanaan menunjukkan pola yang terorganisir secara fungsional. Di MAN Barito Utara, pembagian tugas melibatkan koordinator UKS yang memastikan aspek kesehatan dan higienitas, wali kelas yang mengawasi kehadiran siswa, serta petugas SPPG yang bertanggung jawab atas serah terima makanan. Di SMAN 4 Muara Teweh, guru piket mengawasi distribusi, tenaga administrasi mengelola absensi penerima manfaat, dan kepala sekolah melakukan pengawasan umum. SPPG sendiri memiliki pembagian unit kerja yang terstruktur meliputi tim produksi, tim distribusi, dan tim monitoring-evaluasi.

Kelemahan struktural yang ditemukan adalah belum adanya formalisasi peran melalui instrumen administratif resmi seperti Surat Keputusan (SK) kepala sekolah. Pembagian tugas yang berjalan selama ini masih bersifat informal, berpotensi menimbulkan kekosongan tanggung jawab ketika ada petugas yang berhalangan hadir. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip redundansi birokrasi yang dikemukakan Edwards III.

Secara keseluruhan, struktur birokrasi menunjukkan fondasi yang cukup solid melalui SOP terstandar dan fragmentasi kerja yang fungsional. Namun, formalisasi peran melalui dokumen administratif resmi dan mekanisme penggantian petugas yang lebih terstruktur menjadi agenda prioritas yang perlu segera ditangani.

Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis Dalam Mewujudkan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Barito Utara

Komunikasi

Meskipun mekanisme transmisi dan konsistensi pesan secara umum telah berjalan baik, terdapat tiga kendala signifikan pada dimensi kedalaman dan kelengkapan informasi. Pertama, ketidakseragaman penanganan sisa makanan antarsekolah karena petunjuk teknis tidak memuat panduan spesifik mengenai prosedur pengelolaan makanan yang tersisa. Kedua, belum jelasnya mekanisme substitusi menu ketika bahan baku lokal tidak tersedia, terutama mengingat kondisi geografis Kabupaten Barito Utara yang memiliki keterbatasan aksesibilitas pasokan pangan tertentu. Ketiga dan paling mendasar, hampir tidak adanya edukasi gizi yang disampaikan kepada peserta didik sebagai kelompok sasaran utama. Siswa hanya memahami jadwal dan prosedur pengambilan makanan, tetapi tidak mendapatkan penjelasan mengenai kandungan gizi dari setiap menu yang dikonsumsi, sehingga dimensi nutrition literacy yang menjadi tujuan jangka panjang kebijakan belum terwujud.

Sumber Daya

Kendala sumber daya merupakan hambatan paling substansial dalam penelitian ini. Dari dimensi SDM, ketiadaan tenaga khusus berlatar belakang gizi atau kesehatan pangan di kedua sekolah mengakibatkan pengelolaan MBG dibebankan kepada guru piket, wali kelas, dan tenaga administrasi yang merangkap tugas. Kondisi ini mengandung dua risiko: kualitas penanganan makanan yang berpotensi tidak optimal dan beban kerja berlebih yang dapat berdampak pada penurunan kinerja tugas utama para guru. Belum tersedianya pelatihan formal yang terstruktur dan berkelanjutan memperparah kondisi ini.

Dari dimensi sarana dan prasarana, kapasitas ruang distribusi yang tidak mampu menampung seluruh siswa sekaligus menyebabkan distribusi harus dilakukan secara bergilir per kelas, sehingga memperpanjang waktu proses dan berpotensi mengganggu jadwal KBM. Sejumlah siswa terpaksa menikmati makanan sambil berdiri karena minimnya tempat duduk. Keharusan siswa menyediakan peralatan makan secara mandiri berpotensi menciptakan ketimpangan di antara peserta didik. Keterbatasan jumlah tempat cuci tangan juga menjadi

catatan penting dari aspek higienitas, yang jika tidak terpenuhi dapat mengurangi manfaat kesehatan dari program.

Disposisi/Sikap Pelaksana

Berbeda dari variabel lainnya, disposisi atau sikap pelaksana merupakan satu-satunya variabel yang tidak menunjukkan kendala signifikan. Seluruh pihak yang terlibat menunjukkan komitmen moral yang kuat, kejujuran dalam pelaporan, motivasi yang tinggi, serta respons positif dan antusias terhadap kebijakan. Kendala yang ada lebih bersifat teknis dan manajerial, bukan attitudinal.

Struktur Birokrasi

Pada aspek SOP, kendala pertama adalah SOP yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik spesifik masing-masing sekolah, khususnya MAN Barito Utara yang memiliki jadwal kegiatan berbeda dari sekolah umum. Kendala kedua adalah sosialisasi SOP kepada peserta didik yang masih bersifat verbal dan informal, tanpa panduan tertulis yang dapat dijadikan acuan mandiri.

Pada aspek fragmentasi, kendala paling kritis adalah belum terformalnya pembagian tugas melalui Surat Keputusan (SK) resmi dari kepala sekolah. Tidak adanya formalisasi ini berpotensi menimbulkan dua risiko utama: pertama, ketidakjelasan tanggung jawab dalam situasi tertentu; kedua, belum tersedianya mekanisme penggantian petugas yang sistematis ketika petugas berhalangan hadir, berpotensi menimbulkan kekosongan fungsi yang mengganggu kelancaran distribusi. Hal ini bertentangan dengan prinsip redundansi birokrasi yang dikemukakan Edwards III, di mana setiap fungsi kritis dalam implementasi kebijakan harus memiliki prosedur cadangan.

Secara keseluruhan, kendala pada variabel struktur birokrasi lebih bersifat kelalaian administratif yang dapat diselesaikan secara relatif cepat dengan komitmen dari pimpinan satuan pendidikan. Penerbitan SK pembagian tugas, penyusunan panduan tertulis bagi siswa, dan pengembangan SOP yang lebih adaptif merupakan langkah konkret yang dapat segera diambil.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di MAN Barito Utara dan SMAN 4 Muara Teweh secara umum telah berjalan baik namun belum optimal. Berdasarkan analisis menggunakan teori Edwards III, disimpulkan bahwa: (1) Komunikasi berlangsung terstruktur

dan konsisten melalui mekanisme berjenjang dengan berbagai media komunikasi, meskipun masih terdapat kesenjangan pada aspek edukasi gizi kepada peserta didik; (2) Sumber daya menghadapi kendala utama pada keterbatasan tenaga ahli gizi di sekolah dan kapasitas fasilitas distribusi yang belum memadai, sementara aspek kewenangan telah terbagi secara efektif; (3) Disposisi pelaksana merupakan kekuatan terbesar program, di mana seluruh pihak menunjukkan komitmen, integritas, dan antusiasme yang tinggi sehingga menjadi faktor penyeimbang di tengah berbagai keterbatasan; (4) Struktur birokrasi memiliki fondasi SOP yang komprehensif namun pembagian kerja belum terformalkan melalui SK resmi serta belum tersedia mekanisme penggantian petugas yang sistematis.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara untuk segera mengalokasikan anggaran khusus pengadaan fasilitas distribusi makanan yang memadai dan peralatan makan berstandar di seluruh sekolah peserta program, serta menerbitkan SK resmi yang mengatur pembagian tugas pelaksana program secara tertulis dilengkapi mekanisme penggantian petugas. Kepada SPPG, direkomendasikan untuk menyempurnakan panduan teknis dengan menambahkan prosedur pengelolaan sisa makanan yang seragam, protokol substitusi menu, dan modul edukasi gizi yang dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan belajar mengajar, serta mendorong penyesuaian SOP sesuai karakteristik masing-masing sekolah melalui penyelenggaraan pelatihan gizi dan keamanan pangan yang terstruktur bagi staf sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Herdiana, D. (2025). Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15063556>
- Lambe, J., et al. (2026). Memaknai kebijakan program makan bergizi gratis (MBG) berdasarkan teori hierarki kebutuhan Maslow di SD Negeri 2 Kendari, Sulawesi Tenggara tahun 2025. *Inovasi Kesehatan Global*, 3(2). <https://doi.org/10.62383/ikg.v3i2.3043>
- Nasir Rahmad, Baso Tonda Boli, R.S Abdullah, Amrillah Rizki, & Plaikari Rizal Pasoma. (2026). Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah: Analisis Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Koordinasi Aktor. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 9, 2548–2553. <https://www.tempo.co/politik/sederet-fakta->
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, Pub. L. 115, 1 (2025). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/343430/perpres-no-115-tahun-2025>

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional, Pub. L. 83, 1 (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/295857/perpres-no-83-tahun-2024>
- Pora, S., Muksin, D., & Rahmat, A. F. (2025). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Pada Pemerintahan Prabowo-Gibran: Solusi dan Tantangan. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 635–694. <https://doi.org/10.33506/jn.v11i2.4352>
- Pujiyanto, A., & Solihat, M. (2026). Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Studi Kasus SMKN 1 Jogonalan. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 7(1), 115–128. <https://journal.stmiki.ac.id>
- Putri, A. B., et al. (2026). Pengaruh program makan bergizi gratis (MBG) terhadap minat belajar siswa sekolah dasar. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 3(1). <https://doi.org/10.62383/edukasi.v3i1.2790>
- Rifna, et al. (2026). Analisis sentimen pengguna TikTok terhadap program makan bergizi gratis menggunakan metode Naive Bayes. *IT-Explore: Jurnal Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 5(2). <https://doi.org/10.24246/itexplore.v5i2.2026.pp241-251>
- Sakila, D., et al. (2026). Pemanfaatan program makan bergizi gratis berdasarkan teori ABC: Studi kasus siswa yang tidak memanfaatkan MBG di SD Negeri 100 Kendari. *Jurnal Kesehatan dan Kedokteran*, 3(2). <https://doi.org/10.62383/vimed.v3i2.2985>
- Septiana Louisa Silaban, Sutri Destemi Elsi, & Dimas Rizal. (2026). Analisis Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Jambi Menurut Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 3(1), 137–149. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v3i1.1547>
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi*. PT Menuju Insan Cemerlang.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)*. Cv Alfabeta: Bandung.
- Suryanto, E., Hazin, M., Purwoko, B., & Khamidi, A. (2026). Analisis Implementasi Program MBG terhadap Manajemen Pendidikan melalui Model Edward III: Suatu Kajian Pustaka. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 5(2), 231–240. <https://doi.org/10.30872/impian.v5i2.5998>
- Wibowo, B. T., et al. (2026). Transparansi dan pengawasan keuangan negara dalam implementasi program makan bergizi gratis (MBG). *Jurnal Media Administrasi*, 11(1). <https://doi.org/10.56444/jma.v11i1.3670>
- Yohanes, P., Arwimbar, I., Rahmadani, U., & Masyarakat, F. K. (2026). Analisis Implementasi Dan Kendala Dalam Program Mbg Pada Pendidikan Sd, Smp Dan Sma Negeri Di Kota Jayapura. *Jurnal Ners*, 10, 1179–1184. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners>